

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI KOTA SEMARANG, STUDI KASUS: Masyarakat
Pengguna Pusat Informasi Publik (PIP) Tahun 2017**

Oleh:

Girenda Kumala Cahyaningtyas*

14010113130070

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Currently Semarang City government has been intensively carry out improvements to the implementation of government information towards good governance through public information disclosure is packed with good public service. This is intended to facilitate the public in obtaining various information in the information of the government. During this time, information disclosure is considered important for some people, while ordinary people sometimes take little care of it.

The formation of perceptions needs to be built so that people can use the information provided by the government. Therefore, good governance is the practice or procedure of government and society managing resources to solve public problems. This study aims to explain how the public perceptions of Semarang city against public information disclosure. The method used in this research is qualitative, by doing data collection techniques using interviews, observation and literature study. Data analysis is done by data reduction phase, data presentation, verification and conclusion.

The results showed that 1) Semarang City knowledge about the existence of KIP has not been fully referring to UU KIP. 2) lack of understanding of the community about the implementation of KIP. 3) people's assessment of KIP generally tends to require only satisfactory outcomes but does not change their behavior to participate in government. The solution to overcome this is the government is more proactive by providing intelligence to the community through innovative programs related to public information disclosure.

Keywords: *Good governance*, Public information disclosure, Perception

A. PENDAHULUAN

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, good governance adalah praktek atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. Good governance akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya.¹

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).² Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian

¹ Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andy: Yogyakarta. Hal 108

² Ibid. hal 31

informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Sesuai dengan UUD No 14 tahun 2008 bagian kedua pasal 3 menyatakan *“menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”*.³

Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki predikat keterbukaan informasi yang cukup baik. Seiring dengan berjalannya waktu, kota semarang mulai terus memperbaiki diri untuk menuju good governance melalui keterbukaan informasi publik. Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) sejak tahun 2012 dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Perwal No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Berdasarkan peraturan tersebut maka upaya yang dilakukan pemkot semarang dalam mewujudkan KIP dengan mengikuti perkembangan jaman dengan memanfaatkan sejumlah media sosial di antaranya website, facebook, twitter, youtube, instagram, dan google+. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang

³ UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 th 2008

juga mewujudkan inovasi Pusat Informasi Publik (PIP). Semenjak dibuka tahun 2014, Kantor PIP sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang silih berganti berkunjung untuk mengakses informasi tentang Kota Semarang terkait sarana pelayanan publik maupun untuk melakukan pengaduan. Keunggulan yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan publik sekaligus dalam satu atap, yakni : layanan permohonan data dan informasi pelayanan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M), dan berbagai fasilitas pelayanan publik yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis. Terbukti Inovasi yang dikembangkan oleh Pemkot Semarang ini adalah salah satu pemenang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Akan tetapi, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperoleh informasi kurang dipahami sebagian besar yang berkunjung di PIP ini. Pemahaman dan peran masyarakat sangat penting karena menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, serta sebagai penentu kebijakan berikutnya. Dari uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat kota Semarang terhadap keterbukaan informasi publik. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti masyarakat pengguna layanan tentang keterbukaan informasi publik di Kota Semarang dimana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak hanya sekedar keterbukaan, melainkan keterbukaan yang menyeluruh dan memberi tempat bagi

partisipatif aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai situasi, berbagai kondisi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian⁵. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan gambaran yang berdasar fakta mengenai persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk yang mempengaruhi persepsi yaitu, aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif.

C. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masyarakat pengguna pusat informasi publik Kota Semarang mempunyai berbagai macam pendapat dan pandangan mengenai keterbukaan informasi publik. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk penyesuaian era globalisasi. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan keterbukaan informasi yang telah disediakan, berdampak pada implementasi *good governance* kurang maksimal.

⁴ www.transparansi.or.id diakses pada tanggal 15 April 2017

⁵ Burhan Bungin.. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.2007), hlm.68

1. Persepsi Masyarakat Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aspek Kognitif

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi publik belum seutuhnya mengacu pada informasi publik dan pemanfatannya. Sebagian besar masyarakat kurang memahami konteks dari adanya undang-undang KIP, bahkan hanya beberapa orang yang mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aspek Afektif

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan adanya keterbukaan informasi masih kurang. Sebagian besar masyarakat belum merasa perlu untuk mengetahui ataupun mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pusat informasi publik yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pun, dirasa kurang memberikan stimulus kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

3. Persepsi Masyarakat Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aspek Afektif

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa meskipun saat ini pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keterbukaan informasi sesuai UU yang berlaku tetapi apabila masyarakatnya kurang memahami makna dari undang-undang tersebut maka proses terlibatnya masyarakat dalam pengawasan publik tidak berjalan semestinya. Dengan keadaan yang seperti ini keterbukaan informasi

sulit berkembang pada lingkungan masyarakat yang non-demokratis. Tidak ada demokrasi tanpa adanya partisipasi rakyat, dan tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa adanya transparansi.

D. KESIMPULAN

1. Dilihat dari aspek kognitif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; pada umumnya dinilai sangat dibutuhkan untuk masyarakat sebagai bentuk penyesuaian diri dengan era globalisasi. Segala informasi penting untuk diketahui untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai gejala sosial yang sedang terjadi. Akan tetapi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk dalam pengawasan pemerintah mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah rendah. Mereka cenderung bersikap sebagai pelanggan jasa yang hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan.
2. Dilihat dari aspek afektif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; masyarakat belum memahami PIP sebagai wujud good governance yang diwujudkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari adanya PIP itu belum sampai di masyarakat, maksudnya masyarakat hanya memanfaatkan sebagian kecil dari fasilitas pemerintah ini, tapi tidak memaksimalkan akses yang lain. Kemudian

ruang lingkup keterbukaan informasi di Semarang masih sempit, maksudnya adalah keterbukaan masih dalam rangka program kebijakan dari pemerintah pusat yang dikerjakan oleh pemerintah daerah tapi belum menyentuh keterbukaan untuk masyarakat.

3. Dilihat dari aspek konatif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; meskipun sebagian besar pengguna pusat informasi publik memahami pentingnya keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi tidak merubah perilaku mereka untuk ikut terjun dalam pemerintahan. Mereka cenderung hanya menuntut dengan adanya hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan masyarakat masih kurang dalam sikap kritis dan dewasa. Mereka kurang memiliki persepsi apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amal, ichlasul dan Armaidi armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Andrianto, Nico.2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Jatim: Bayumedia

Ardian M. 2004. *RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama

- Dwiyanto, Agus, ed. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press
- Jalaluddin rakhmat, *Psikologi Komunikasi. Edisi Revisi*
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy
- Eko Prasodjo. *Buku Panduan Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen*. Jakarta: UNDP
- Prawira, purwa atmaja. 2014. *Psikologi umum dengan perspektif baru*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Samsuri. 2004. *Media dan Trnsparansi*. Yogyakarta: IRE Press
- Sarwono, sarlito. 2009. *Pengantar Psikologis Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: ALFABETA
- Wibowo, Edd; Tomo. 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. Yogyakarta: YPAPI
- Wulan, Asih S. *Buku Pedoman Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Semarang*. Semarang: Penerbit: Bagian Humas Setda Kota Semarang

Web dan Jurnal

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 , Nomor 4 , 2014: 3410 - 3420

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/viewFile/439/408>

<http://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/download/28/28>

<http://repository.unika.ac.id/4739/1/10.20.0005%20Teddy%20Wijaya%20-%20COVER.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30485/1/Appendix.pdf>

<http://www.liputanfakta.com/132/220/kota-semarang/berita-pilihan/liputan-pusat-informasi-publik-kota-semarang-1-dari-3>

https://semarangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota%20Semarang%20dlm%20Angka%202016-wm.pdf

<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/04/29/pelayanan-dan-keterbukaan-informasi-publik-di-semarang-cukup-bagus-bagaimana-dengan-kota-di#sthash.UgL551Yg.dpuf>

Prabowo, Rizki dwi. 2012. *Implementasi UU KIP dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, DPPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*. Skripsi

Retnowati, Endang. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)*. Skripsi

Sakti, bima. 2014. *Peran PPID dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik*. Skripsi

www.semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/75

www.semarangkota.go.id

www.transparansi.or.id

Perundang- Undangan

UU No. 14 TAHUN 2008 - KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

